



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANWAR SANUSI
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 519555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m²/27 m² di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1122 m² di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 185 m² di KOTA JAKARTA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 731.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/196 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/250 m² di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 626 m² di PONOROGO, WARISAN Rp. 219.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.900.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO 125 SKUTIK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 594.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.647.979.742
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.857.979.742
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.857.979.742

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.